

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini meneliti kredibilitas kebijakan fiskal dalam aturan defisit, aturan utang, diskresi dan *openness* sebagai variabel bebas serta inflasi sebagai variabel terikat, dengan menggunakan data dalam bentuk kuartal dari tahun 2001-2013 di Indonesia. Berdasarkan data yang telah dieksekusi dengan menggunakan aplikasi *Eviews 8*, terdapat beberapa kesimpulan dalam temuan yang telah peneliti lakukan, diantaranya:

- Kredibilitas kebijakan aturan defisit (Z1) dengan koefisien negatif tidak signifikan menjelaskan inflasi. Berarti bahwa kenaikan kredibilitas aturan defisit tidak berdampak pada penurunan inflasi.
- Kredibilitas kebijakan aturan utang dalam model AR (Z2AR) dengan koefisien negatif dan signifikan menjelaskan inflasi. Berarti bahwa kenaikan kredibilitas aturan utang berdampak pada penurunan inflasi di Indonesia.
- Kebijakan diskresioner (Z3) dengan koefisien negatif dan tidak signifikan menjelaskan inflasi. Berarti bahwa kebijakan diskresioner yang dilakukan pemerintah tidak berdampak pada penurunan inflasi.
- *Openness* (Z4) yang diambil dari sektor riil (ekspor dan impor) dengan koefisien positif signifikan menjelaskan inflasi. Berarti bahwa kenaikan *openness* baik dalam ekspor ataupun impor berdampak pada kenaikan inflasi.

- Jadi kebijakan fiskal yang kredibel terhadap inflasi terbukti secara statistik lebih cepat mencapai keseimbangan daripada kebijakan fiskal yang tidak kredibel. Artinya semakin kredibel kebijakan fiskal akan membawa dampak efektivitas kebijakan kearah yang dituju menjadi semakin cepat.

B. Implikasi

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka implikasi dari penelitian ini adalah kredibilitas aturan defisit terdapat hasil yang tidak kredibel sehingga tidak mampu menurunkan inflasi. Hal ini disebabkan karena pengeluaran negara yang belum terserap dengan baik dan banyaknya ketidakdisiplinan terhadap uang negara serta tidak adanya komitmen dan konsistensi dalam menjalankan kebijakan yang direncanakan sehingga terjadi celah besar antara defisit aktual dengan defisit yang direncanakan. Kemudian mengakibatkan masyarakat tidak percaya terhadap aturan defisit untuk menstabilkan inflasi. Dan pada akhirnya aturan defisit kehilangan kredibilitasnya, dengan tidak adanya kredibilitas dari aturan defisit mengakibatkan anggaran tidak terkendali dan dapat meningkatkan defisit anggaran yang dapat menyebabkan kenaikan inflasi yang tinggi. Dengan demikian berarti bahwa faktor-faktor politik dan kelembagaan menjadi kendala dalam kredibilitas kebijakan aturan defisit.

Selanjutnya kredibilitas aturan utang signifikan terhadap inflasi memiliki arti bahwa kredibilitas aturan utang berdampak pada penurunan inflasi, dan untuk aturan utang mendapatkan hasil bahwa aturan utang dinyatakan kredibel. Hal ini terlihat dari simpangan antara utang *actual* dengan utang *planning* yang tidak besar, sehingga dengan aturan utang yang kredibel membuat pelaku ekonomi merasa percaya untuk

meminjamkan atau memberikan utang kepada Indonesia dengan demikian dana yang didapat digunakan untuk menutup defisit anggaran yang terjadi sehingga negara tidak mengalami inflasi karena tingginya defisit anggaran.

Kredibilititas aturan utang ini lebih kredibel dibandingkan dengan aturan defisit hal ini karena melihat pada saat *pasca* krisis keuangan global tingkat inflasi cenderung tinggi namun mengakibatkan nilai *rill* stok utang secara konsisten menurun, hal ini dikarenakan pada kasus inflasi akan menaikkan utang nominal namun memberikan penurunan yang konsisten terhadap nilai *rill* stok utang. Oleh karena itu aturan utang lebih kredibel dan diperlukan konsistensi dari pemerintah dalam penerapan aturan utang agar tetap memiliki kredibilitas yang baik.

Selanjutnya untuk kebijakan diskresioner mendapatkan hasil yang tidak signifikan dan negatif terhadap inflasi, berarti diskresioner belum mampu menurunkan inflasi. Di Indonesia kebijakan diskresioner dapat membahayakan kestabilan target inflasi, hal ini dikarenakan kebijakan diskresioner membutuhkan waktu yang lama dan membutuhkan kehati-hatian dalam mempertimbangkan kondisi perekonomian suatu negara, apabila pemerintah salah langkah mengambil keputusan saat membuat kebijakan maka akan berakibat memperburuk kondisi perekonomian dan akan memperburuk kestabilan inflasi. Dalam beberapa tahun krisis inflasi yang terjadi membuat pemerintah terpaksa mengeluarkan kebijakan diskresioner untuk menaikkan subsidi dan menurunkan pajak, hal ini bukannya menurunkan inflasi, tetapi akan memperparah kenaikan inflasi karena akan menimbulkan kenaikan yang tinggi pada defisit anggaran.

Terakhir, hasil menunjukkan untuk *openness* signifikan dan positif terhadap inflasi, artinya kenaikan *openness* mampu menaikkan inflasi sehingga mengakibatkan

terancamnya produsen dalam negeri. Beberapa produsen yang tidak mampu bersaing akan mengalami kerugian karena kenaikan biaya produksi yang tinggi, bukan hanya produsen yang terancam rugi, tetapi perekonomian juga akan lesu karena banyaknya tenaga kerja yang diberhentikan sehingga pengangguran meningkat. Oleh karena itu produk impor luar negeri yang menulari inflasi harus dicarikan substitusi untuk memperkuat industri dalam negeri sehingga tidak bergantung pada barang impor.

C. Saran

Atas dasar implikasi dari hasil pembahasan di atas, maka peneliti dapat memberikan beberapa saran, diantaranya sebagai berikut :

1. Kredibilitas kebijakan aturan defisit harus memperhatikan komitmen dan konsistensi pemerintah dalam melaksanakannya. Serta memperbaiki sistem politik untuk meminimalisir defisit anggaran yang berlebihan karena penyalahgunaan anggaran.
2. Memperkuat koordinasi antara kebijakan moneter dari bank sentral dengan kebijakan fiskal untuk mencapai inflasi yang direncanakan.
3. Pemerintah harus lebih berhati-hati ketika akan mengambil kebijakan diskresi dengan menyesuaikan kebijakan yang tepat untuk stabilisasi pengendalian inflasi yang tak terduga.
4. Pemerintah mengamankan produk-produk yang potensial mendorong terjadinya inflasi, artinya produk impor luar negeri yang menulari inflasi harus dicarikan substitusi untuk memperkuat industri dalam negeri sehingga tidak terlalu bergantung pada barang impor.

5. Pemerintah harus memperhatikan kondisi inflasi yang ada di dalam negeri apakah inflasi sedang tidak stabil atau sebaliknya, serta melihat kondisi perekonomian dalam negeri ketika akan melakukan ekspor dan impor.